

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 473-485.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*.
- BPKP. (2018). *SISKEUDES Sistem Keuangan Desa Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- COSO. (2013). *Internal Control – Integrated Framework (2013)*. Swiss: kpmg.ca.
- Mulyadi. (2006). *Sistem Akuntansi (Edisi 3)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramlan & Sihombing, E. N. A. M. (2021). *Hukum Pemerintahan Desa*. Medan: Enam Media.
- Redaksi KPPN. (2019). *Modul Sakti*. Jakarta: Direktorat SITP.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi (Edisi 13)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting Information Systems (14 th edition)*. New York: Pearson.
- Adriyanto. (2021). *Kebijakan Dana Desa Tahun 2021*. Retrieved from Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- CNN Indonesia. (2021, September 13). *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. Retrieved November 3, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
- ICW. (2022, April 19). *ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021*. Retrieved from Databoks:

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus%20Korupsi%20Berdasarkan%20Sektor%20\(2021\)&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20\(ICW\)%20menemukan,kerugian%20ne.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021#:~:text=Kasus%20Korupsi%20Berdasarkan%20Sektor%20(2021)&text=Indonesia%20Corruption%20Watch%20(ICW)%20menemukan,kerugian%20ne.)

Kemendagri. (2012, Juli). *Data Pokok*. Retrieved from Prodeskel Bina Pemdes: <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

Kemendagri. (2012). *Progres Entri Data Prodeskel Bina Pemerintahan Desa*. Retrieved from Profil Desa dan Kelurahan: <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mpublik/>

Kurnianingrum. (2021). *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-PKD-2021.-6-7-januari.pdf>

Simons. (1995). *Control in an Age of Empowerment*. Retrieved from <https://hbr.org/1995/03/control-in-an-age-of-empowerment>

Suharso. (2016, Oktober 4). *Sejarah COSO*. Retrieved from Klikharso.com: <https://www.klikharso.com/2016/04/sejarah-lengkap-coso.html>

Bupati Pati. (2021). *Peraturan Bupati Pati Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas. Pemerintah Kabupaten Pati: Pati.*

Kepala Desa Tajungsari. (2020). *Peraturan Desa Tajungsari Nomor 07 Tahun 2021 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tajungsari Tahun Anggaran 2021*. Tajungsari.

Kepala Desa Tajungsari (2020). *Rancangan Peraturan Desa Tajungsari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Tajungsari.

Kepala Desa Tajungsari. (2021). *Peraturan Kepala Desa Tajungsari Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Daftar Penerimaan Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2021*. Tajungsari.

- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta Pusat.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.05/2018 Tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. Jakarta Pusat.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan D*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Penganggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penang*. Jakarta.
- Tajungsari, K. D. (2020). *Rancangan Peraturan Desa Tajungsari Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. Tajungsari.